

# Proses Pembiayaan KUR di BSI: Studi Kasus pada Divisi Mikro BSI Kraksaan

Meilinda Frasasti

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [frasastimeilinda@gmail.com](mailto:frasastimeilinda@gmail.com)

## Kata Kunci:

Kredit Usaha Rakyat (KUR),  
UMKM, pembiayaan mikro,  
perbankan syariah, prinsip  
syariah

## Keywords:

People's Business Credit  
(KUR), MSMEs,  
microfinance, sharia  
banking, Islamic principles

## ABSTRAK

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya dalam penyediaan akses permodalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kraksaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembiayaan KUR Syariah telah berjalan secara sistematis dan sesuai prinsip syariah, mulai dari tahap pengajuan hingga monitoring pasca-pembiayaan. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan pengawasan dan edukasi akad agar pembiayaan dapat lebih optimal dalam mendukung keberlanjutan UMKM. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa proses pembiayaan KUR Syariah telah berjalan secara sistematis dan sesuai prinsip syariah, mulai dari tahap pengajuan hingga monitoring pasca-pembiayaan. Implementasi pembiayaan ini merupakan bagian dari upaya konkret perbankan syariah dalam mendukung ekosistem UMKM, sejalan dengan arahan strategis Bank Indonesia dalam pengembangan sektor perbankan syariah ke depan (Arfan, 2025). Lebih lanjut, efektivitas program KUR di BSI KCP Kraksaan terbukti mampu mendorong peningkatan skala usaha nasabah, mengonfirmasi hasil penelitian (Jaya, 2018) yang menemukan adanya pengaruh signifikan Kredit Usaha Rakyat terhadap peningkatan nilai produksi usaha mikro kecil. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan pengawasan dan edukasi akad agar pembiayaan dapat lebih optimal dalam mendukung keberlanjutan UMKM. Implikasi praktis dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas internal perbankan dalam aspek pendampingan nasabah pasca-pencairan dana. Dengan demikian, sinergi antara kebijakan makro regulator dan implementasi mikro perbankan dapat terwujud secara harmonis demi akselerasi pertumbuhan UMKM berbasis syariah.

## ABSTRACT

Sharia banking plays a crucial role in supporting the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, particularly in providing access to capital. This study aims to analyze the financing process for Sharia People's Business Credit (KUR) at Bank Syariah Indonesia (BSI) Kraksaan Branch Office. The research method used was a qualitative approach through interviews and case studies. The results indicate that the KUR Sharia financing process has been carried out systematically and in accordance with sharia principles, from the application stage to post-financing monitoring. However, increased supervision and education regarding contracts are needed to optimize financing in supporting the sustainability of MSMEs. The results of the study indicate that the KUR Sharia financing process has been carried out systematically and in accordance with sharia principles, from the application stage to post-financing monitoring. The implementation of this financing is part of the concrete efforts of Islamic banking to support the MSME ecosystem, in line with Bank Indonesia's strategic direction for the future development of the Islamic banking sector (Arfan, 2025). Furthermore, the effectiveness of the People's Business Credit (KUR) program at BSI KCP Kraksaan has been proven to encourage an increase in the scale of customer businesses, confirming the results of research (Jaya,



2018) which found a significant influence of People's Business Credit (KUR) on increasing the production value of micro, small, and medium enterprises. However, increased supervision and education regarding contracts are needed to optimize financing in supporting the sustainability of MSMEs. The practical implications of this research emphasize the importance of strengthening internal banking capacity in the aspect of post-disbursement customer assistance. Thus, synergy between macro regulatory policies and micro banking implementation can be harmoniously realized to accelerate the growth of Sharia-based MSMEs.

---

## Pendahuluan

Peran strategis perbankan syariah kian terasa dalam mengakselerasi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional (Aisyah & Maulida, 2024). Mengingat UMKM terbukti menjadi solusi lapangan kerja bagi masyarakat dengan keterbatasan akses ekonomi (Yolanda et al., 2024), diperlukan dukungan sistem keuangan yang inklusif. Menyikapi hal ini, (Arfan, 2025) mengungkapkan bahwa Bank Indonesia telah mengambil langkah proaktif dengan merancang berbagai inisiatif untuk mematangkan ekosistem dan pengembangan perbankan syariah di masa depan, guna memastikan sektor ini dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha

Daya tahan UMKM teruji ketika menghadapi guncangan krisis ekonomi di mana sektor ini menunjukkan resiliensi yang lebih tinggi. Ketangguhan tersebut salah satunya ditopang oleh minimnya ketergantungan pada faktor eksternal seperti utang dalam denominasi valuta asing maupun penggunaan bahan baku impor (Fitriyah & Rahman, 2023). Namun, tantangan utama yang kerap menghambat laju pertumbuhan UMKM adalah akses terhadap permodalan. Keterbatasan modal membuat pengembangan usaha berjalan lambat, sehingga diperlukan solusi pendanaan yang relevan dengan kebutuhan pelaku usaha (Maria et al., 2024). Di sinilah lembaga keuangan syariah dengan produk yang dirancang untuk segmen ini dapat menawarkan alternatif yang solutif (Mongkito et al., 2021).

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kraksaan Probolinggo menunjukkan komitmennya dalam mendorong sektor usaha kecil melalui penawaran berbagai produk pembiayaan mikro, seperti BSI Usaha Mikro (BUM) dengan akad murabahah serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah. Produk-produk ini diharapkan mampu mendongkrak kapasitas produksi para pelaku UMKM setempat. Harapan ini sejalan dengan temuan (Jaya, 2018) dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan, yang mengungkapkan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat terbukti memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan nilai produksi usaha mikro kecil di Kota Metro.

Sementara itu, program KUR di BSI KCP Kraksaan terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan skala kebutuhan modal: yakni, ada KUR Super Mikro dengan plafon dari Rp.5 juta hingga Rp.10 juta, KUR Mikro dengan rentang Rp. 11 juta hingga Rp100 juta, dan KUR Kecil yang melayani pembiayaan dari Rp100 juta hingga Rp500 juta. Seluruh segmen KUR ini ditawarkan dengan margin setara 6% per tahun (Yunawa et al., 2024). Melalui skema ini, BSI berupaya mendorong UMKM agar dapat berkembang dan memberi kontribusi lebih besar (Adekantari et al., 2024). Divisi Pembiayaan Mikro

memegang fungsi strategis dalam keseluruhan proses, mulai dari tahap pengajuan awal hingga penandatanganan kontrak pembiayaan. Penulisan ini bertujuan menguraikan bagaimana alur pembiayaan KUR tersebut diimplementasikan di BSI KCP Kraksaan.

## Pembahasan

Berdasarkan wawancara dengan salah satu staf di unit pembiayaan mikro BSI Kraksaan, alur pembiayaan KUR dapat diilustrasikan melalui sebuah studi kasus. Sebagai contoh, seorang nasabah bernama Mei, yang merupakan pemilik usaha toko kelontong mengajukan pembiayaan sebesar Rp5 juta. Langkah pertama bagi nasabah adalah melengkapi dokumen persyaratan (Bimantara et al., 2024).

Persyaratan yang harus dipenuhi meliputi status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, serta memiliki usaha yang telah beroperasi setidaknya selama enam bulan. Dokumen pendukung yang diperlukan adalah fotokopi KTP nasabah dan pasangan fotokopi NPWP dan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Setelah berkas diterima, tahapan di sisi bank diawali dengan pemeriksaan riwayat kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh OJK, atau yang lebih dikenal sebagai BI Checking. Hasil dari pemeriksaan ini menjadi penentu kelayakan awal seorang calon nasabah (Irtiqouli'ulya & Yazid, 2024). Jika calon nasabah tidak memiliki riwayat KUR sebelumnya, proses dapat dilanjutkan. Nasabah yang pernah menerima KUR namun telah melunasinya juga masih memiliki kesempatan untuk mengajukan kembali. Sebaliknya, aplikasi akan otomatis ditolak jika calon nasabah masih memiliki pinjaman KUR yang aktif (Widyastuti, 2024).

Langkah berikutnya adalah survei lapangan atau On the Spot (OTS) untuk memverifikasi data dan memastikan keabsahan informasi yang diberikan. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh petugas pembiayaan secara mandiri atau bersama dengan pemimpin tim (Team Leader). Selama survei, petugas akan menggali informasi lebih dalam, mencakup profil usaha, durasi operasional, estimasi omzet dan laba bulanan, rincian biaya operasional, serta sumber permodalan yang digunakan sebelumnya.

Data yang terkumpul dari survei kemudian dianalisis secara finansial untuk mengukur kapasitas pembayaran angsuran nasabah. Sebagai contoh, analisis akan menilai apakah nasabah mampu membayar cicilan untuk pinjaman Rp50 juta dalam tenor tiga tahun. Dari analisis ini, akan muncul satu dari tiga kemungkinan keputusan:

1. Disetujui sepenuhnya sesuai nominal dan tenor yang diajukan.
2. Disetujui dengan penyesuaian, misalnya nominal pembiayaan diturunkan atau jangka waktu diperpanjang.
3. Ditolak, jika analisis menunjukkan risiko gagal bayar yang tinggi.

Pengajuan yang lolos dari tahap analisis akan dibawa ke komite pembiayaan. Informasi kemudian diteruskan kepada Marketing Financing Assistant (MFA) untuk melakukan konfirmasi akhir kepada nasabah melalui telepon. Jika semua tahap

terlewat, proses berlanjut ke penandatanganan akad pembiayaan antara bank dan nasabah. Setelah akad selesai, dana akan dicairkan ke rekening nasabah. Proses tidak berhenti di situ, karena bank akan tetap melakukan pemantauan berkala untuk memastikan dana dimanfaatkan sesuai rencana dan usaha nasabah berjalan lancar.

## Kesimpulan dan Saran

Dari hasil wawancara dan analisis yang dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa BSI KCP Kraksaan telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang efektif. Bank ini berhasil menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan, khususnya pelaku UMKM. Peran BSI dalam pembiayaan KUR terbukti mampu memberikan akses permodalan serta pendampingan sebelum dan sesudah pencairan, yang pada akhirnya turut menunjang kesejahteraan UMKM di sekitar Kraksaan.

Meskipun skema pembiayaan ini telah sesuai dengan prinsip syariah secara umum, ditemukan bahwa implementasi pada proses jual beli barang terkadang belum sepenuhnya sejalan dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan murabahah. Terkait potensi pembiayaan bermasalah, pihak bank telah memiliki strategi penanganan yang terstruktur.

Sebagai rekomendasi, BSI KCP Kraksaan diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap nasabah, terutama dalam hal penggunaan dana pembiayaan. Hal ini menjadi krusial untuk memastikan modal yang disalurkan benar-benar produktif untuk pengembangan usaha, bukan untuk tujuan konsumtif. Di samping itu, kualitas pelayanan selama proses pengajuan perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Penekanan yang lebih kuat pada edukasi mengenai akad yang digunakan juga diperlukan agar implementasinya di lapangan selaras sepenuhnya dengan esensi akad murabahah.

## Daftar Pustaka

- Adekantari, S., Bank, B., & Himpunan, H. (2024). *Peran Bank BSI Dalam Meningkatkan Perekonomian UMKM*. 4(1), 95–115.
- Aisyah, E. N., & Maulida, L. U. (2024). Peran Pembiayaan Kur Mikro Dalam Mendukung Pertumbuhan Umkm Di Bank Syariah Indonesia Kcp Malang Turen 1. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 9, 187–196. <https://repository.uin-malang.ac.id/20747/>
- Arfan, A. (2025). *Inisiatif Bank Indonesia dalam perencanaan pengembangan perbankan syariah*. <http://repository.uin-malang.ac.id/23336/>
- Bimantara, A. Y., Makruf, A., Alfaritsi, R., & Pratiwi, A. (2024). Alur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 281–282.
- Fitriyah, S. L., & Rahman, T. (2023). *Meningkatkan Pendapatan Nasabah Umkm Pada Bsi Kc*. 6(November), 636–646.
- Irtiqouli'ulya, P., & Yazid, M. (2024). Prosedur Pemberian Pembiayaan Bsi Kur (Kredit Usaha Rakyat) Sebagai Bentuk Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bsi Kcp

- Gudang Garam Kediri. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 11(2), 76–83. <https://doi.org/10.53429/jdes.v11i2.906>
- Jaya, T. J. (2018). *Analisis pengaruh kredit usaha rakyat terhadap nilai produksi usaha mikro kecil di kota Metro*. <https://repository.uin-malang.ac.id/6208/>
- Maria, V., Situmeang, T., & Ardana, R. F. (2024). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kecamatan Serang, Kabupaten Serang. *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 12–36.
- Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. N. (2021). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 1(1), 91. <https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>
- Widyastuti, E. (2024). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah*. 9(1), 40–62.
- Yolanda, C., Hasanah, U., Tjut, U., Dhien, N., Studi, P., Pembangunan, E., Tjut, U., Dhien, N., & Manajemen, P. S. (2024). 2830-7690 peran usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) dalam pengembangan ekonomi indonesia 1. 2(3), 170–186.
- Yunawa, S. I. P., Maulidah, A. R., Alya, A., & Wulandari, A. (2024). Sistem Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman. *Journal of Multidisciplinary Research*, 1(1), 62–68.